

BAGAIMANA PERAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU DI INDONESIA?

Komang Tri Yasrawan
Desak Nyoman Sri Werastuti *

Universitas Pendidikan Ganesha, Jln. Udayana no. 11, Singaraja, Indonesia
*sri.werastuti@undiksha.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 28, 2021

Revised August 02, 2022

Accepted September 28, 2022

Key words:

Green Accounting; Implementation;
Environmental Costs

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3514>

ABSTRACT

Research Purposes. The purpose of this study was to determine the role of green accounting in reducing environmental pollution and to examine the extent to which the application of green accounting in Indonesia supported sustainability.

Research Method. This study used an interpretive approach that focused on the subjective nature of the social world and tried to understand it.

Research Result and Findings. Reporting environmental costs in green accounting will certainly help stakeholders to evaluate environmental conservation and improve environmental management efficiency to support business continuity in the present and in the future. Green accounting had difficulty in measuring the value of costs and benefits of externalities arising from industrial processes. It was not easy to measure the harm that occurs to the people around and the ecological environment caused by air pollution, liquid waste, ammonia tube leaks, nuclear tube leaks, or other externalities. Unfortunately, in practice, often some companies did not report the bad news they face, so reporting environmental costs was not effective.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran akuntansi hijau dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan untuk menguji sejauh mana penerapan akuntansi hijau di Indonesia dalam mendukung keberlanjutan.

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif yang berfokus pada sifat subjektif dari dunia sosial dan mencoba untuk memahaminya.

Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian. Pelaporan biaya lingkungan dalam akuntansi hijau tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelestarian lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan untuk mendukung kelangsungan usaha di masa sekarang dan masa yang akan datang. Akuntansi hijau mengalami kesulitan dalam mengukur nilai biaya dan manfaat dari eksternalitas yang timbul dari proses industri. Tidak mudah untuk mengukur kerugian yang terjadi pada orang-orang di sekitar dan lingkungan ekologi yang disebabkan oleh polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amonia, kebocoran tabung nuklir, atau eksternalitas lainnya. Sayangnya, dalam penerapannya, seringkali beberapa perusahaan tidak melaporkan berita buruk yang dihadapinya, sehingga pelaporan biaya lingkungan tidak efektif.

PENDAHULUAN

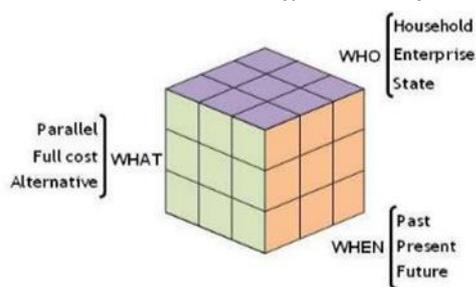
Semakin bertumbuhnya dunia industri maka permasalahan terhadap lingkungan juga semakin berkembang karena perilaku industri tidak jarang tidak peduli akan dampak bagi lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri seperti tercemarnya air, tercemarnya tanah, tercemarnya udara serta terjadinya kesenjangan sosial. Kepentingan perusahaan bukan saja mengenai manajemen dan pemilik modal, namun staff pegawai, pelanggan dan masyarakat sekitar juga perlu dipentingkan. Bebbington (2001) menyebutkan bahwa peran yang penting diberikan

oleh akuntansi dalam pengelolaan hubungan diantara perusahaan serta lingkungan. Mengenai pertanggungjawaban sosial serta lingkungan dari segi akuntansi adalah tanggung jawab yang bersifat unik khususnya mengenai pengungkapan dan pelaporannya (Riduwan & Andayani, 2011). Pertanggungjawaban terhadap lingkungan akan berpengaruh juga terhadap kinerja dari perusahaan. Dikatakan sebagai perusahaan yang baik, apabila perusahaan tidak terfokus pada laba saja namun juga peka akan keadaan dari lingkungan sekitar perusahaan dan kesejahteraan dari masyarakat disekitarnya. Cooper (1992) mengatakan bahwa

akuntansi harus berperan untuk berkontribusi terhadap masalah lingkungan daripada hanya melakukan tindakan pencegahan saja. Informasi yang berhubungan dengan lingkungan merupakan tujuan dari diterapkannya akuntansi lingkungan (Burhany, 2014).

Memasuki abad 21 yang terus mengalami kemajuan dan kemakmuran, penekanan lebih diberikan kepada alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun, menyadari betapa pentingnya lingkungan berperan dalam kelangsungan hidup dalam jangka panjang, semakin banyak organisasi memimpin, pemerintah dan asosiasi menyadari tidak hanya perlu melindungi lingkungan tetapi juga perlu menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Korporasi dan Bisnis bersama-sama memahami dan merumuskan langkah-langkah untuk mempromosikan ramah lingkungan dan hijau untuk masa kini dan masa depan. Di antara berbagai langkah lain yang diambil dalam hal ini adalah cabang akuntansi baru yang disebut "Akuntansi lingkungan" atau "Akuntansi Hijau". Ini juga disebut akuntansi sumber daya atau akuntansi terintegrasi.

Kerangka kerja Akuntansi Hijau yang ditawarkan oleh Greenham (2010) mengusulkan metodologi yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, seperti yang digambarkan pada Gambar 1, yang terdiri dari: (1) SIAPA: Tindakan siapa yang kita pertanggungjawabkan?; (2) KAPAN: Kapan tindakan dan dampak terjadi?; dan (3) APA: Bagaimana kita mencoba mengukur dampak ini?



Gambar 1. Kerangka Green Accounting (Greenham, 2010)

Menggabungkan pertimbangan sosial dan lingkungan mungkin bekerja lebih baik di beberapa tingkatan (misalnya akuntansi nasional, daripada yang lain, seperti akuntansi perusahaan). Namun, kerangka kerja ini mungkin lebih baik dilihat sebagai langkah menuju pemahaman kerangka kerja Akuntansi Hijau yang komprehensif daripada sebagai tujuan akhir.

Akuntansi sebagai ilmu menghitung juga mengimplementasikan lingkungan dalam implementasi pengetahuannya. Di tahun 1970-an perkembangan konsep dari akuntansi lingkungan mulai terlihat di Eropa. Permasalahan mengenai lingkungan dan dampak yang ditimbulkan juga dirasakan di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Desakan dari perkumpulan bukan pemerintah dijadikan dasar dari berkembangnya konsep ini sehingga membuat kesadaran dari masyarakat lebih meningkat akan kelestarian lingkungan dan mengharuskan perusahaan agar dapat mengelola lingkungan sekitarnya yang tidak hanya terfokus pada laba saja dan aktivitas industri (Arfan, 2008). Menurut Lodhia (2008), isu lingkungan telah mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir terkait beredarnya informasi mengenai aktivitas industri yang berpotensi membahayakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi peristiwa besar yang diperlukannya pengendalian akan aktivitas yang bersifat komersil guna mendukung aktivitas bisnis yang lebih lanjut. Selain itu, krisis moral secara global merupakan krisis ekologi secara global. Oleh karena itu, etika dan moral sangat perlu dimiliki guna mengatasi krisis ekologi global tersebut

Masalah terkait lingkungan yang paling banyak terjadi di masyarakat Indonesia yaitu pemanasan global. Di dalam kinerja ekonomi suatu usaha termuat masalah terhadap lingkungan yang dampaknya dirasakan langsung ataupun secara tidak langsung. Disempurnakannya kebijakan mengenai lingkungan usaha dan informasi mengenai keuntungan mengenai produk perlindungan akan lingkungan adalah salah satu gambaran yang dilaksanakan saat ini. (Sukirman & Suciati, 2019) mengemukakan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Pengevaluasian aktivitas lingkungan dari segi biaya lingkungan dan manfaat ekonomi merupakan tujuan dari diterapkan konsep akuntansi lingkungan sehingga efisiensi pengelolaan terhadap lingkungan dapat meningkat.

Di masa perkembangan perusahaan menjadi perusahaan hijau, usaha industri bukan hanya terfokus pada limbah saja melainkan dituntut untuk aktivitas produksi baik dari pengelolaan bahan baku sampai terbuangnya produk habis konsumsi agar tidak mencemari lingkungan. Dengan adanya

ISO dapat memperkuat gerakan perusahaan hijau yang didalamnya termuat criteria lingkungan dalam standar produksi suatu barang (Idris, 2012).

Melihat semakin luasnya cakupan operasional perusahaan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka perlu memperhatikan dan mengendalikan lingkungan yang tercemar serta perbaikan ekosistem supaya sektor-sektor yang penting untuk pembangunan dapat dilestarikan. Upaya pengelolaan lingkungan dengan mengacu pada prinsip ramah lingkungan sangat dibutuhkan oleh perusahaan, untuk itu penelitian terbatas ini melihat bagaimana penerapan akuntansi lingkungan di Indonesia.

Objek penelitian ini adalah penerapan *green accounting* pada dua perusahaan. Sesuai dengan pemaparan yang sudah disajikan, maka adapun masalah yang termuat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Akuntansi Hijau di Indonesia dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan menerapkan Akuntansi Hijau dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk diketahuinya peran dari akuntansi hijau guna pengurangan pencemaran terhadap lingkungan serta untuk menilai seberapa jauh *green accounting* diterapkan di Indonesia untuk mendorong berlangsungnya bisnis suatu perusahaan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Asforth dan Gibbs (1990, dalam Abdullah et al., 2015) legitimasi digunakan perusahaan sebagai potensi manfaat atau sumber potensial agar dapat bertahan. Menurut Ahmad & Sulaiman (2004) pengertian akan kontrak sosial di dalam institusi sosial dan public menjadi dasar bagi teori legitimasi. Praktik diungkapkannya tanggung jawab perudahaan harus dilakukan dengan tepat dan benar agar aktivitas dan kinerja perusahaan bisa diterima oleh masyarakat, hal ini dijelaskan dalam teori legitimasi.

Said (2020) juga menyebutkan legitimasi dicapai dengan menunjukkan aktivitas organisasi yang sesuai dengan nilai sosial. Ada dua dimensi mengenai legitimasi pencapaian dalam konteks lingkungan, yaitu: (1) tindakan (*action*) yang merupakan kegiatan organisasi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan (2) presentasi menyajikan kegiatan yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai sosial (Dowling & Pfeffer, 1975).

Teori legitimasi sangat tepat digunakan dalam lingkungan akuntansi seperti: akuntansi hijau. Karena legitimasi, perusahaan peduli terhadap

lingkungan menjadi penting agar perusahaan bertanggung jawab tidak hanya terhadap sosial tetapi juga lingkungan tempat perusahaan berada dan bisa berlanjut hingga masa mendatang.

Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Hijau

Istilah akuntansi lingkungan pertama kali digunakan pada tahun 1980-an oleh Profesor Peter Wood. Pada tahun 1970-an mulai berkembangnya konsep akuntansi lingkungan di Eropa. Akuntansi Internasional Standards Committee (IASC) di tahun 1990-an mulai mengembangkan konsep mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akuntansi dalam lintas internasional, perkembangan akuntansi lingkungan dan audit mengenai HAM juga termuat di dalamnya. Selain itu, prinsip-prinsip universal mengenai audit lingkungan juga dikeluarkan oleh standar industri dan auditor yang berkembang serta profesional yaitu AICPA. Kesadaran perusahaan akan lingkungan yang sudah memberikannya manfaat lebih merupakan latar belakang dari pentingnya akuntansi lingkungan diterapkan. Publikasi *Limits to Growth* mempengaruhi konsep akuntansi lingkungan di Eropa pada tahun 1970-an (Meadows et al., 1972) dan gerakan lingkungan yang berkembang. Isu mengenai kerusakan lingkungan juga memperoleh perhatian dari pemerintah Denmark karena krisis minyak yang terjadi pada tahun 1977 sehingga mulai dilakukannya perhitungan untuk mencadangkan dan menghemat energi. Sistem akuntansi untuk penilaian situasi kuantitatif dan kualitatif serta terjadinya perubahan dari sumber daya alam yang dimiliki mulai diterapkan oleh Prancis pada tahun 1980-an (Vanoli, 2005 dalam Andi et al., 2020).

Pedoman-pedoman mengenai akuntansi lingkungan dikeluarkan di bulan Mei tahun 2000, oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya bernama NS Badan Lingkungan Jepang. Penyempurnaan pedoman tersebut dilakukan pada tahun 2002 dan tahun 2005. Akuntansi lingkungan diwajibkan untuk diterapkan pada seluruh perusahaan yang berada di Jepang. Penempatan posisi akuntansi lingkungan sudah disejajarkan dengan posisi akuntansi keuangan di perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Pengurangan biaya lingkungan, peningkatan kinerja lingkungan yang sebelumnya bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan serta kesuksesan bisnis perusahaan merupakan alasan utama yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menerapkan akuntansi lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan.

Pengertian Akuntansi Hijau

Menurut Arfan (2008), akuntansi lingkungan merupakan identifikasi, alat ukur dan pengelolaan pembiayaan lingkungan serta mengintegrasikan biaya untuk mengambil sebuah keputusan bisnis dan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada pemangku kepentingan perusahaan. *Green Accounting* merupakan inovasi baru pada bidang akuntansi yang bertujuan untuk merubah titik focus proses akuntansi tidak di proses transaksi saja (Aniela, 2012). Akuntansi Hijau dapat dimaknai sebagai identifikasi, prioritas, kuantifikasi, atau kualifikasi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis). Akuntansi hijau juga termasuk ke dalam akuntansi sosial yang dikarenakan kedua akuntansi tersebut mempunyai capaian yang sama, mau tercapai secara baik maupun buruk yang termuat dalam laporan keuangan dari perusahaan.

Perusahaan sangat penting menggunakan akuntansi lingkungan, hal ini termuat di dalam fungsi dan peran akuntansi lingkungan yang terdiri dari dua bagian yaitu (1) fungsi internal, adalah fungsi yang melekat dengan internal perusahaan. Pihak yang menjalankan usaha pada bagian internal yaitu pada bagian rumah produksi dan rumah tangga pelanggan disebut dengan pihak internal (Arfan, 2008). Pimpinan perusahaan menjadi harapan akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen bisnis saat berhadapan dengan unit bisnis dan hal ini yang menjadi factor paling dominan di dalam fungsi internal. (2) Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan. Diungkapkannya hasil pelestarian lingkungan yang berbentuk data akuntansi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan dalam fungsi eksternal. Akuntansi lingkungan perlu dijadikan bahan pertimbangan karena fokus dari pemegang saham akan tertuju pada akuntansi lingkungan ini yang dapat memberikan manfaat dalam pengurangan biaya lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang lebih berkualitas.

Dasar Hukum Akuntansi Lingkungan

Dasar hukum akuntansi lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegahnya serta menanggulangi pencemaran dan

perusakan (Pasal 6 ayat 1)

2. Setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 16 ayat 2)
3. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah (Pasal 6 ayat 1)
4. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat 1)
5. Barang siapa yang melakukan perbuatan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 41 ayat 1)
6. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Pasal 42 ayat 1).

Idris (2012) menemukan bahwa saat melaksanakan peraturan perundang-undangan, perusahaan yang memiliki limbah akan mengelola limbahnya untuk memenuhi baku mutu lingkungan yang pasti memerlukan biaya guna menciptakan Unit Pengelolaan Limbah (UPL) dan membayar operasionalnya. Hal ini berarti, UPL akan memerlukan biaya operasional atau biaya lingkungan. Apabila dari sudut pandang hubungan biaya dengan produk yang diciptakan maka biaya tidak bisa dibagi menjadi biaya produksi langsung maupun tidak langsung. Biaya lingkungan ada disebabkan oleh aktivitas produksi perusahaan. Akan tetapi, apabila dari pihak perusahaan maka biaya lingkungan adalah biaya eksternal, sedangkan dari pihak masyarakat biaya lingkungan merupakan biaya internal.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretif dan konstruktif merupakan jenis dari penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian interpretif dapat memberikan kesempatan peneliti untuk berhubungan secara subjektif dengan peserta penelitian. Secara umum pendekatan interpretif adalah sistem sosial yang mengartikan perilaku dengan mendetail langsung melakukan observasi. Interpretif memiliki sudut pandang bahwa kenyataan sebagai sesuatu yang

unik dan mempunyai tujuan dan arti yang mengkhusus sebagai hal untuk mengerti arti sosial. Interpretif memiliki sudut pandang bahwa kenyataan yang tidak kaku dan menyatu dengan sistem makna.

Mengintepretasikan banyak makna perilaku dan pernyataan dapat dilakukan dengan berbagai cara (Newman, 1997). Pendekatan fokus terhadap sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha untuk memaknainya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Peneliti ingin menerangkan dan memberikan gambaran dari segala keadaan yang terjadi pada objek yang diteliti didasarkan dengan fakta sebenarnya. Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan peran dan implementasi dari akuntansi hijau dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dinilai melalui penekanan kepada keempat faktor yang tersedia yakni faktor nilai kebenaran, nilai penerapan, nilai konsistensi, dan nilai netralitas. Uji keabsahan data yang digunakan dalam riset ini yakni triangulasi, melalui pengidentifikasi data berdasarkan teknik serta waktu yang beragam. Interview, pengamatan dan pengarsipan digunakan sebagai cara mengumpulkan data primer pada riset ini. Guna menaikkan tingkat keyakinan atau tingkat ketepatan data riset kualitatif, riset ini memakai uji kredibilitas (*credibility*).

Informan kunci pada riset ini yakni akuntan pada dua entitas yang mengimplementasikan *green accounting*. Kedua perusahaan ini mempunyai sistem penerapan *green accounting* yang sama. Pemilihan *accounting* perusahaan sebagai informan kunci didasarkan pada alasan bahwa bagian *accounting* merupakan pihak yang mengetahui dan berhubungan secara langsung penerapan *green accounting* perusahaan. Bapak A yang merupakan akuntan pada perusahaan A dan Bapak B yang merupakan akuntan pada perusahaan B. Triangulasi waktu dilaksanakan pada masing-masing narasumber (akuntan entitas). Narasumber yang merupakan akuntan entitas ini dipilih melalui peninjauan wawasan serta lama pengalaman dalam pengimplementasian *green accounting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Penerapan Green Accounting

Akuntansi hijau merupakan penyebutan populer untuk akuntansi lingkungan dan sumber

daya alam, yang menggabungkan aset lingkungan dan fungsi sumber dan memasukkannya ke dalam akun nasional dan perusahaan (Bartelmus, 2008). PBB pertama kali menerbitkan buku pegangan tentang Sistem Akuntansi Lingkungan dan Ekonomi yang terintegrasi (SEEA) diintegrasikan pada tahun 1993. SEEA memperkenalkan aset ekonomi lingkungan dan alam dan 'biaya lingkungan' dari degradasi penipisannya ke dalam Sistem Neraca Nasional (SNA) (United Nations, 1993).

Menurut tinjauan Bartelmus (2008), studi kasus akuntansi hijau telah menerapkan penilaian pasar parsial yang bagus untuk penipisan sumber daya alam. Bartelmus (2008) juga melihat keunggulan khusus akuntansi hijau sebagai alat ukur biaya lingkungan yang terjadi karena agen ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Prinsip pencemar atau pengguna membayar yang terkenal adalah meminta pertanggungjawaban agen yang memiliki tanggung jawab akan efek dari lingkungan mereka 'dan' dapat menilai efisiensi ekonomi dan ekologi dari berbagai tindakan perlindungan lingkungan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Beberapa tujuan dari akuntansi hijau adalah:

1. Menilai biaya dan manfaat lingkungan untuk suatu masalah
2. Untuk memisahkan dan mengklasifikasikan berbagai biaya lingkungan
3. Untuk menghubungkan sumber daya fisik dengan neraca lingkungan dalam istilah moneter

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memperhitungkan kerugian akibat kerusakan yang timbul dari penarikan sumber daya dan dampak ekologis sosialnya. Akuntansi hijau pada tingkat individu atau kelompok atau organisasi, diartikan dalam arti yang sangat sempit mengurangi sifat dan potensi manusia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertindak dalam dimensi yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pengungkapan Asjuwita & Agustin (2020) bahwa sering kali perusahaan mengabaikan masalah lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini membuat perusahaan merasakan dampak yang besar yang nantinya bisa mengancam keberlangsungan (*sustainability*) usahanya. Padahal perlu meningkatkan persepsi tentang bagaimana suatu benda melekat pada lingkungan alam dan sosial, dari mana bahan baku diperoleh, bagaimana suatu benda diproduksi secara massal, bagaimana penggunaannya mempengaruhi lingkungan alam

dan masyarakat yang menggunakannya.

Mengabaikan masalah lingkungan dan aspek sosial jelas menjadi masalah bagi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan, kelangsungan hidup berkaitan erat dengan legitimasi keberadaan sosial suatu perusahaan dalam masyarakat tertentu (Said, 2020). Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan hendaknya mengungkapkan praktik tanggung perusahaan dengan tepat dan benar sehingga aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

Perusahaan mengklasifikasikan biaya lingkungan berdasarkan kegiatannya dan tidak menentukan biaya lingkungan, sehingga informasi tersebut disembunyikan dan manajer mengalami kesulitan mengendalikan biaya lingkungan (Abdullah & Yuliana, 2018). Taufiqurrahman & Sitepu (2020) menekankan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mempunyai manfaat sebagai bentuk komitmen bidang bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai etika dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi yang seimbang baik kepada pihak internal perusahaan, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, pengaturan hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pencapaian tujuan jangka pendeknya, manajemen akan mencoba menggunakan teknik dan prosedur tertentu (Healy, 1985; Watts, 1977; Watts & Jerold, 1978) dan akan mengeksploitasi sumber daya secara maksimal (Gorz, 2003). Salah satu sumber daya utama yang paling banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuan jangka panjang adalah sumber daya alam. Namun ironisnya, alam juga mendapat perhatian atau kontribusi terkecil. Dengan semakin tingginya tingkat konsumsi manusia, maka sumber daya yang diperlukan juga akan banyak seiring dengan tingkat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Akibatnya, semakin banyak pula sampah yang terbentuk selama proses penggalian sumber daya alam tersebut (Soemarwoto, 2004).

Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan sangatlah kompleks. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa perusahaan selalu menimbulkan kerugian. Perhatian dan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan juga terungkap dalam penelitian Buhr (1998); Burrit

& S. Welch (1997); Hemmer (1988); Ljungdahl (2004); Peurse et al., (1995); Tischler et al., (2002); Viller & Staden (2004); Idrawahyuni et al., (2020); dan Suyudi et al., (2020). Meskipun para peneliti ini menekankan penekanan yang berbeda, tetapi pada dasarnya menunjukkan kepedulian mereka pada aspek sosial atau lingkungan sebagai salah satu dimensi yang perlu mendapat perhatian perusahaan.

Idris (2012) menyebutkan bahwa realisasi dari CSR di Indonesia khususnya terkait kategori *discretionary responsibility*, bisa diperhatikan dari dua pemikiran yang berbeda. Pertama, pengimplementasian CSR adalah aktivitas bisnis tanpa pamrih dari buah pikiran perusahaan dan tidak termasuk aktivitas yang diharuskan oleh perusahaan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, pengimplementasian CSR didasarkan dengan tuntutan hukum (wajib). Apabila diperhatikan dari pengimplementasian CSR di Indonesia, jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan sudah melakukan program CSR dan menyusun laporan, tidak bisa disebut sebagai perusahaan yang sudah mengimplementasikan akuntansi lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena operasional perusahaan tidak menuangkan usaha untuk melestarikan lingkungan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (Idris, 2012).

Selain negara-negara diluar Indonesia, Indonesia juga menghadapi krisis ekologi atau lingkungan yang serius dan menakutkan. Krisis tersebut sudah menciptakan segala permasalahan ekologi dan sosial yang memberikan dampak kerugian dan membuat kelangsungan hidup manusia menjadi terancam. Lingkungan yang rusak disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak peduli akan kelestarian lingkungan yang menggunakan lingkungan sebagai sumber daya alam guna membangun rasa peduli akan lingkungan (Meliyana, 2013). Etika lingkungan merupakan dasar dari kepedulian akan lingkungan. Etika lingkungan yang digunakan sampai saat ini, berdasarkan pada sistem nilai yang meletakkan manusia tidak termasuk dari alam, tetapi manusia termasuk sebagai penakluk dan pengatur alam. Pemanasan global merupakan peristiwa yang terjadi karena eksploitasi alam yang terlalu berlebih tidak didasarkan pada aturan dan pemikiran yang tepat (Dj, 2010). Iklim yang terus berubah dan terjadinya pemanasan global serta degradasi lingkungan sudah memicu terjadinya bencana alam, sosial serta ekonomi yang berada pada tingkat serius.

Pada zaman pemanasan global ini, lingkungan menjadi masalah yang krusial. *Green accounting* yang diterapkan pada laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memperoleh rasa peduli yang mengkhhusus. Kehadiran *green accounting* adalah bentuk dan kesadaran untuk mengimplementasikan rasa peduli terhadap lingkungan mengingat lingkungan memiliki kontribusi besar bagi keberlangsungan hidup tidak hanya bagi perusahaan tetapi bagi masyarakat pada umumnya. Seperti diketahui kalau penyebab paling utama dari pemanasan global yaitu kadar dari CO₂ yang semakin tinggi. Hal ini bisa terjadi karena kadar CO₂ emisi mengalami peningkatan dan mengurangi absorbansi CO₂ dimana fungsinya untuk menyaring karbondioksida menjadi oksigen. Sektor utama yang menghasilkan CO₂ seperti energi pembangkit, minyak dan transportasi industri. Kemudian secara teknis pemanasan global bisa dikendalikan dengan pengurangan CO₂ emisi dan peningkatan CO₂ absorbansi, untuk misalnya dengan menghemat bahan bakar, penggantian bahan bakar berbasis fosil dengan sumber energi baru/terbarukan seperti listrik kendaraan, menangkap CO₂ dalam emisi gas buang industri dengan memperbanyak pohon di rumah perkotaan. Tingginya karbon dioksida di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi udara di sekitarnya.

Fakta empiris menunjukkan bahwa setelah UU tersebut disahkan oleh DPR pada Juli 2007, banyak perusahaan mulai peduli dan menerapkan CSR wajib dan melaksanakan tanggung jawab sukarela corporate social (CSR). Banyak perusahaan publik dan swasta mulai berkomitmen untuk melaksanakan CSER dan CSR secara berkesinambungan dan melaporkan informasinya dalam Laporan Tahunan Direksi. Selain itu, selain jumlah perusahaan yang melaksanakan CSER dan CSR terus meningkat, tingkat keterbukaan informasi mereka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan juga meningkat. CSER dan CSR bahkan telah diakui sebagai kebutuhan inti korporasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan dan investasi strategis bagi perusahaan yang tumbuh dalam bisnis (Lako, 2015).

Hal yang paling awal dan utama yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk tercapainya kesuksesan dalam penerapan akuntansi lingkungan adalah kecocokan antara evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah kedua, menentukan tujuan perusahaan dengan memilah faktor-faktor utama memiliki dampak akan lingkungan sekitar perusahaan dan menyusun

rencana untuk mengurangi dampak lingkungan. Langkah ketiga, memilih pengukuran yang benar untuk memilih isu lingkungan. Langkah keempat, melaksanakan sistem nilai secara administrasi guna mencapai tujuan pada setiap segmen. Langkah kelima, memperoleh segmen akuntansi guna menjadi alat ukur dari semua divisi perusahaan. Langkah keenam, lakukan pengujian dan langkah terakhir adalah mempelajari kinerja.

Konsep Akuntansi Hijau: Perspektif Kontribusi Perusahaan terhadap Lingkungan

Berlandaskan pada teori legitimasi, perusahaan hendaknya mengungkapkan praktik tanggung perusahaan dengan tepat dan benar sehingga aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan terkait keterbatasan pengungkapan biaya lingkungan dalam operasional perusahaan. Sebagai penyelesaian dalam memecahkan masalah keterbatasan dan kelemahan akuntansi secara manual merupakan konsep akuntansi hijau atau akuntansi keberlanjutan yang diusulkan. Konsep ini merupakan terobosan baru dalam bidang akuntansi yang berdasarkan nilai-nilai cinta dan peduli akan lingkungan alam semesta dan juga antar manusia di dalam proses akuntansi. Sangat diharapkan konsep ini dapat berkembang dan diimplementasikan dalam praktik akuntansi perusahaan, entitas negara atau pemerintah, dan rumah tangga (Greenham, 2010). Perkembangan penelitian pada bidang pengungkapan akuntansi sosial, ditemukan masih banyak perusahaan yang menyampaikan dalam laporan bahwa kinerja lingkungannya masih sangat rendah. Lindrianasari (2007) memberikan penegasan bahwa faktor keterbatasannya kinerja lingkungan yaitu karena ditiadakan sanksi atau hukuman yang ditentukan di negara tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengungkapan informasi terkait lingkungan masih sangat terbatas dalam laporan keuangan. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan. Kesulitan tersebut juga berupa kekurangmampuan pihak perusahaan dalam menilai kerugian lingkungan sekitar akibat dari aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharto (2004, dalam Anggriani, 2006) yang menyebutkan bahwa diungkapkannya informasi mengenai lingkungan dalam laporan keuangan masih belum mendetail, terjadinya ketidakseimbangan akan biaya dan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dalam memuat informasi lingkungan di laporan keuangan serta

pengenalan kewajiban bersyarat dan kesulitan dalam mengidentifikasi biaya lingkungan merupakan halangan bagi manajemen keuangan saat memuat laporan mengenai lingkungan dalam laporan keuangan.

Terjadinya kesulitan yang dialami akuntansi lingkungan saat menilai biaya dan manfaat dari eksternalitas yang muncul dari aktivitas produksi. Sangatlah sulit dilakukannya pengukuran tingkat kerugian yang didapatkan oleh masyarakat dan lingkungan ekologi karena dampak dari udara yang tercemar, adanya limbah berbentuk cair serta tabung amoniak dan nuklir atau eksternalitas lain yang bocor. Pelaporan mengenai kinerja sosial dan lingkungan tidak termuat dalam pelaporan keuangan manual, hanya laporan mengenai kinerja ekonomi saja yang ditemukan (Idris, 2012), padahal pengungkapan informasi Lingkungan diharapkan memberikan informasi tambahan kepada pemangku kepentingan selain dari yang sudah tercakup dalam laba akuntansi (Rahmawati & Subardjo, 2017). Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan. Namun, pengungkapan informasi Akuntansi Lingkungan yang masih bersifat sukarela kurang memberikan kontribusi optimal terhadap lingkungan (Suyudi & Wulaningrum, 2019). Permasalahan terkait *green accounting* ini terjadi pada berbagai jenis industri. Studi empiris menunjukkan penerapan *Green Accounting* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi misalnya masih belum menyeluruh, masih adanya perusahaan yang tidak memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak melaporkannya secara rinci (Lestari et al., 2019).

Hal ini juga yang terjadi di Indonesia karena dinilai sangat rumit dan kurangnya wawasan yang tepat bagi para pemangku kepentingan yang ditakutkan dampak dari pelaksanaan dan biaya tambahan akan diakui sebagai biaya yang tidak boleh dikeluarkan dalam perspektif akuntansi konvensional (Nurhayati et al., 2006 dalam Arisandi & Frisko, 2011). Hal ini sesuai dengan hasil studi empiris (Ningtyas & Aryani, 2020) yang menunjukkan bahwa aktivitas CSR menambah biaya perusahaan yang justru menurunkan kinerja perusahaan. Studi empiris menunjukkan bahwa pelaporan atas kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan akan mengurangi laba perusahaan ketika diakui sebagai beban di luar usaha (Afni et al., 2019).

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Gray et al. (1993 dalam Burrit & Welch, 1997) bahwa diungkapkannya biaya eksternalitas akan memberikan pengaruh akan pengambilan keputusan dan pertimbangan dari pemangku kepentingan akibat dari reaksi pasar yang sudah menggambarkan hasil yang lain pada kegiatan perusahaan yang dilakukan (atau tidak) kepentingan sosial dan lingkungan, dan terlaksananya akuntabilitas lingkungan akan sukses apabila didorong oleh undang-undang. Pengalokasian biaya lingkungan sebagai sarana mengelola lingkungan secara efisien, akan sangat bermanfaat bagi perusahaan (Hapsari et al., 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa keunggulan dan eksistensi perusahaan dihadapan publik dapat diwujudkan melalui pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan (Rindiyawati & Arifin, 2019).

Susunan pengungkapan sukarela masih belum benar. Bukti dari Deegan & Rankin (1996) menyatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh perusahaan dalam pelaporan perusahaan masih dibilang bias karena perusahaan cenderung menyembunyikan informasi buruk yang terjadi di perusahaannya. Maka dari itu, banyak pihak yang menuntut agar prinsip, kerangka konseptual dan standar serta peraturan akuntansi yang mendasari praktik akuntansi selama ini perlu dirubah ke arah ramah lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Astuti (2012) bahwa terungkapnya akuntansi lingkungan pada Negara yang masih mengalami perkembangan dinilai sangat rendah. *Green Accounting* merupakan langkah awal yang merupakan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada dengan mengevaluasi kegiatan lingkungan dari perspektif biaya (biaya lingkungan) dan manfaat (manfaat ekonomi) serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (perlindungan lingkungan). Namun hal tersebut belum tercapai dikatakan sebagai solusi konkrit, akuntansi lingkungan hanya dapat menjadi jalan bagi unsur-unsur tertentu untuk melegalkan kegiatan perusahaan, meskipun dengan berbagai cara konsekuensinya.

SIMPULAN

Akuntansi Hijau pada awalnya lahir karena isu pengungkapan lingkungan yang harus dihadapi dimana komponen yang fokus pada transaksi bukanlah proses akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas yang akan mempengaruhi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan sebutan yang menyangkut mengenai pembiayaan lingkungan ke

dalam implementasi akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Akuntansi lingkungan menjadi awal yang merupakan solusi dari permasalahan lingkungan dengan mengevaluasi kegiatan lingkungan dari perspektif biaya (biaya lingkungan) dan manfaat (manfaat ekonomi) serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan. Biaya lingkungan merupakan efek yang muncul dari sudut pandang financial dan non financial yang diharuskan untuk ditanggung sebagai hasil dari aktivitas yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Keberadaan akuntansi hijau sangat mendorong perusahaan dalam aktivitas evaluasi seperti kegiatan lingkungan terutama analisis permasalahan limbah.

Publikasi pelaporan biaya lingkungan tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kelestarian lingkungan sehingga efisiensi kelola lingkungan dapat meningkat guna mendukung kelangsungan usaha di masa sekarang dan masa yang akan datang. Namun sayang, dalam pengimplementasiannya beberapa perusahaan dalam pelaporan perusahaan masih dibalang bias karena perusahaan cenderung menyembunyikan informasi buruk yang terjadi di perusahaanya., sehingga pelaporan mengenai biaya lingkungan tidak efektif. Hal ini yang perlu dikaji dalam akuntansi hijau. Perlu dicoba menggambarkan kunci untuk akuntansi hijau dengan cara melihat kembali definisi dan tujuan dari akuntansi hijau. Jadi, hasilnya diperoleh sejalan dengan apa yang diharapkan ramah lingkungan, tidak hanya di bidang akuntansi tetapi dalam melestarikan lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan *green accounting*, akan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, langkah-langkah yang ditawarkan juga perlu diuji secara statistik atau objektif, apakah langkah-langkah tersebut sudah diterapkan di perusahaan atau belum agar menghasilkan data yang lebih akurat.

REFERENCES

- Abdullah, M. W., Muchlis, S., & Sari, S. N. (2015). Pengaruh Tekanan Stakeholders dan Tanggung jawab Sosial terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan di Kawasan Industri Makassar. *Assets*, 5(1), 105-114. <https://doi.org/10.24252/.v5i1.1168>
- Abdullah, M. W., & Yuliana, A. (2018). Corporate Environmental Responsibility: An Effort To Develop A Green Accounting Model. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 305-320. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.390>
- Afni, Z., Meuthia, R. F., Zahara, & Rahmayani, R. (2019). Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemeriksaan Green Accounting Pada Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 340-349. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20794>.
- Ahmad, N. N., & Sulaiman, M. (2004). Environment Disclosure in Malaysia Annual Reports: A Legitimacy Theory Perspective. *International Journal of Commerce and Management*, 14(1), 44-58. <https://doi.org/10.1108/10569210480000173>
- Andi, A. K., Alimuddin, Habbe, H., Mediaty, & Kamri, A. M. (2020). Green Accounting and Its Implementation in Indonesia. *Efektor*, 7(1), 59-72. <https://doi.org/10.29407/e.v7i1.14414>.
- Anggriani, R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi 9: Padang*.
- Aniela, Y. (2012). Peran Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 137-149.
- Arfan, I. (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arisandi, D., & Frisko, D. (2011). Green Rush in Accounting Field of Indonesia From Different Perspectives. *Prosiding. Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 2011 Conference on Interdisciplinary Business Research*: Bangkok. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1869450>.
- Asjuwita, M., & Agustin, H. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3327-3345. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.285>
- Astuti, N. (2012). Mengenal Green Accounting. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 69-75.
- Bartelmus, P. (2008). *Measuring Sustainable Economic Growth and Development*. Didapatkan dari https://editors.eol.org/eoearth/wiki/Measuring_sustainable_economic_growth_and_development, 17 Juni 2021, pukul 12.10 WIB.
- Bebbington, J. (2001). *Sustainable Development: A Review of the International Development*. Didapatkan dari

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=257434, 10 Juni 2021, pukul 10.50 WIB.
- Buhr, N. (1998). Environmental Performance, Legislation and Annual Report Disclosure: The Case of Acid Rain and Falconbridge. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 11(2), 163–190. <https://doi.org/10.1108/09513579810215455>.
- Burhany, D. I. (2014). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan. *Prosiding. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB) 2014*: Bandung.
- Burrit, R. L., & Welch, S., (1997). Accountability for Environmental Performance of the Australian Commonwealth Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(4), 532–561. <https://doi.org/10.1108/09513579710367494>.
- Cooper, C. (1992). The Non and Nom of Accounting for (m)other Nature. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 5(3), 16–39. <https://doi.org/10.1108/09513579210017361>.
- Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(2), 50–67. <https://doi.org/10.1108/09513579610116358>.
- Dj, M. M. (2010). *Kerusakan Lingkungan Perspektif Al-Quran (Studi Tentang Pemanasan Global)*. (Skripsi, Program Tafsir-Hadis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia). Didapatkan dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2156/1/94201-Muh.Mukhtar%20Dj.pdf>.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour. *Pacific Sociology Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>.
- Gorz, A. (2003). *Ekologi dan Krisis Kapitalisme Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Insist Press.
- Greenham, T. (2010). Green Accounting: A Conceptual Framework. *International Journal of Green Economics*, 4(4), 333–345. <https://doi.org/10.1504/IJGE.2010.037655>.
- Hapsari, H. R., Irianto, B. S., & Rokhayati, H. (2021). Pentingnya Alokasi Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Dan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 407–420. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29598>.
- Healy, P. (1985). The Impact of Bonus Scheme on the Selection of Accounting Principles. *Journal of Accounting and Economic*, 7, 85–107. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(85\)90029-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(85)90029-1)
- Hemmer, T. (1988). Performance Measurement System Incentive, and the Optional Allocation of Responsibilities. *Journal of Accounting and Economics*, 25, 321–347. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(98\)00024-X](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00024-X).
- Idrawahyuni, Alimuddin, Habbe, H., & Mediaty. (2020). Esensi Akuntansi Lingkungan Dalam Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 147–159. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2>.
- Idris. (2012). Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Prosiding. Entrepreneurship Seminar & Call for Paper: Improving Performance by Improving Environment: Semarang*.
- Lako, A. (2015). *Berkah CSR Bukan Fiksi (Edisi ke-1)*. Jakarta: La Tofi.
- Lestari, R., Nadira, F. A., Nurleli, & Helliana. (2019). Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2015-2017). *Kajian Akuntansi*, 20(2), 124–131. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.5990>.
- Lindrianasari. (2007). Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(2), 159–172.
- Ljungdahl, F. (2004). Factors Influencing Environmental and Social Disclosure. *Prosiding. Fourth Asia Pasific Interdisciplinary Research in Accounting Conference: Singapura*.
- Lodhia, S. K. (2008). *Environmental Accounting in Fiji: An Extended Case Study of the Fiji Sugar Corporation*. Didapatkan dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290452, 11 Juni 2021, pukul 16.25 WIB.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Ill, W. W. B. (1972). *The Limits of Growth, A report for the Club of Home's Project on the predicament of Mankind*. New York: The New American Library.
- Meliyana (2013). *Gerakan Lingkungan Hidup Dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Belitung*. (Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia). Didapat dari <http://repository.unj.ac.id/32320/>.

- Newman, W. L. (1997). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ningtyas, A. A. K., & Aryani, Y. A. (2020). Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2016-2017). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 91–102. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.406>.
- Peursem, K. A. Van, Pratt, M. J., & Lawrence, S. R. (1995). Health Management Performance: A Review of Measures and Indicators. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(5), 34–70. <https://doi.org/10.1108/09513579510103254>.
- Rahmawati, M. I., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi yang Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(2), 200–226.
- Riduwan, A., & Andayani. (2011). Tanggung Jawab Lingkungan dan Peran Informasi Lingkungan dalam Pengambilan Keputusan Manajemen: Studi Kualitatif. *Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi 14: Aceh*.
- Rindiyawati, A., & Arifin, J. (2019). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.244>.
- Said, D. (2020). *Kearifan Lingkungan dalam Praktik Akuntansi* (Edisi ke-1). Makassar: Tohar Media.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Edisi ke-10). Jakarta: Djambatan.
- Sukirman, A. S., & Suciati. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837685>.
- Suyudi, M., & Wulaningrum, R. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan dengan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal Sangatta. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi*, 2(1), 97–103. <http://dx.doi.org/10.96964/jamdi.v2i1.114>.
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188–216. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1048>.
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retenrum*, 1(1), 65–75.
- Tischler, L., Biberman, J., & McKeage, R. (2002). Linking Emotional Intelligence, Spirituality and Workplace Performance: Definitions, Models, and Ideas for Research. *Journal of Managerial Psychology*, 17(3), 203–218. <https://doi.org/10.1108/02683940210423114>.
- United Nations. (1993). *Handbook of National Accounting System of Integrated Environmental and Economic Accounting*. Didapatkan dari <https://seea.un.org/content/handbook-national-accounting-integrated-environmental-and-economic-accounting>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. (1997). *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46018/uu-no-23-tahun-1997>, 05 Juni 2021, pukul 11.20 WIB.
- Viller, C. D., & Staden, C. (2004). Trend in Environmental Reporting: Evidence from Africa. *Prosiding. Fourth Asia Pasific Interdisciplinary Research in Accounting Conference: Singapura*.
- Watts, R. (1977). Corporate Financial Statements, A Product of the Market and Political Processes. *Australian Journal of Management*, 2(1), 53–75. <https://doi.org/10.1177/031289627700200104>.
- Watts, R., & Jerold, Z. (1978). Towards a Positive Accounting of the Determinant of Accounting of the Determinant of Accounting Standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.